



“

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

2023”



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

JLN. T. NYAK ARIEF NO. 120 BANDA ACEH 23125

website : bpka.acehprov.go.id email : sandi_bpka@acehprov.go.id

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- penyusunan rancangan
- pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan keuangan Aceh. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan penggabungan dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik Pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsinya sebagai OPA, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja OPA mempunyai kedudukan yang strategis yaitu dokumen yang menjembatani antara perencanaan Organisasi Perangkat Aceh dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), sebagai wujud implementasi dari Renstra OPA dan RPJMA dalam satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja merupakan acuan Organisasi Perangkat Aceh untuk menyusun program dan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang selanjutnya perencanaan program dan kegiatan dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut dalam RKA-OPA.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemah dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh. Rencana Kerja juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Dokumen Renja OPA pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis dalam menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Aceh. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Aceh dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPA dan Renja OPA, orientasi mengenai RKPA dan Renja OPA, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Aceh merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPA yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPA dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Organisasi Perangkat Aceh, evaluasi pelaksanaan Renja OPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja tahapan pencapaian Renstra OPA. BAPPEDA mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja guna penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Aceh, penajaman indikator, target kinerja, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Aceh. Tahap penyusunan rancangan akhir Renja OPA dilakukan dengan pengesahan Kepala Organisasi Perangkat Aceh untuk menetapkan Renja OPA menjadi pedoman di lingkungan Organisasi Perangkat Aceh dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Aceh pada tahun anggaran berkenaan.

Sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Aceh, Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Tujuan atau Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) sebagai pedoman dan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan serta program. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan OPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPA. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pagu Indikatif merupakan pagu anggaran yang diberikan kepada OPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja OPA. Pagu prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Renja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program kegiatan. Untuk itu dipandang perlu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pengelolaan keuangan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi BPKA dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan Tahun Anggaran 2023 serta untuk dapat mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPA serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang visi misi presiden 2020-2024.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini diantaranya adalah:

- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program dan bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBA;
- Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPA adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 serta untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan dan juga sebagai dokumen untuk sarana perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh BPKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam memahami Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2023, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Tercapai tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sejak dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu Tahun 2017.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang mulai berlaku pada tahun 2018. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis.

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian yang direncanakan, dan implikasi dari Program Renstra BPKA adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah BPKA berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada pembangunan daerah pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra, maka BPKA akan terus mengupayakan kedepan untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga target target yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat terealisasi dengan baik.

Tindakan/kebijakan Perencanaan dan Penganggaran dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihinya target kinerja dari program/kegiatan yang diambil, yaitu:

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, dan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- b. Perlu ditingkatkannya koordinasi kepada stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra BPKA. Keberhasilan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan.



TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKA S.D TAHUN 2022

PEMERINTAH ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Urusan Wajib								
3	00 03 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (Non Urusan)	-					-		
03	01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	82%%	-	-	-	-	-	-
03	01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
03	01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
03	01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	158 Unit	-	-	-	-	-	-
03	01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	7 Bidang	-	-	-	-	-	-
03	01 01 010	Penyediaan Alat tulis Kantor	-	1500 Rim Kertas, 471 Kotak Kertas Continuous Form, 1500 Map, 1500 toner, 3 harddisk	-	-	-	-	-	-
03	01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	6 jenis	-	-	-	-	-	-
03	01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	6 gedung	-	-	-	-	-	-
03	01 01 013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	73 Jenis	-	-	-	-	-	-
03	01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-
03	01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	9 bulan	-	-	-	-	-	-
03	01 01 022	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	77%	-	-	-	-	-	
03	01 02	002	Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya Rumah Dinas bagi aparatur yang bertugas di UPTD	-	4 rumah	-	-	-	-
03	01 02	003	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya dokumen perencanaan dan gedung kantor dan tersedianya tanah untuk pembangunan UPTD dan SAMSAT	-	4 DED, 12 gedung, 3 bangunan lainnya	-	-	-	-
03	01 02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	-	7 Unit	-	-	-	-
03	01 02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan, terciptanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	98.47%	-	-	-	-
03	01 02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya pelayanan prima	-	88.31%	-	-	-	-
03	01 02	010	Pengadaan Meubeler	Tersedianya dan terpenuhi kebutuhan Meubeler Kantor sebagai penunjang aparatur dalam menjalankan tugas	-	-	-	-	-	-
03	01 02	013	Pengadaan Komputer	Tersedianya dan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kantor Sebagai Pendukung Operasional Kantor	-	5 komp virtualisasi, 2 ipad, 122 komputer	-	-	-	-
03	01 02	021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah dinas yang layak huni	-	15%	-	-	-	-
03	01 02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	3 gedung	-	-	-	-
03	01 02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	89%	-	-	-	-
03	01 02	030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kedinasan	-	79%	-	-	-	-
03	01 02	041	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Rumah huni yang layak huni	-	100%	-	-	-	-
03	01 02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terjaganya gedung kantor	-	20 bangunan, 3 penimbunan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 02 047	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem/Jaringan IT	-	-	-	-	-	-	-	
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	100%	-	-	-	-	-	
03	01 03 002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	423 Pasang	-	-	-	-	-	
03	01 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	2 jenis	-	-	-	-	-	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	9%	-	-	-	-	-	
03	01 05 001	Pendidikan dan pelatihan formal	-	30 orang	-	-	-	-	-	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	100%	-	-	-	-	-	
03	01 06 002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	2 Jenis Laporan	-	-	-	-	-	
03	01 06 003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	97 kegiatan	-	-	-	-	-	
03	01 06 004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	5 Jenis Laporan	-	-	-	-	-	
03	01 06 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	
	15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	WTP Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	
03	01 15 001	Penyusunan analisa standar belanja	-	49 skpa	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 15 002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	-	-	-	-	-	-	-
03	01 15 003	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	tersedianya pergub standar pedoman dalam penyusunan keuangan daerah jumlah, target tahunan disesuaikan	-	-	-	-	-	-	-
03	01 15 006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya jumlah Qanun/Pergub tentang APBA	-	49 skpa	-	-	-	-	-
03	01 15 007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya jumlah Pergub tentang penjabaran APBA dan tersusunnya Pergub tentang Perubahan Pergub tentang Penjabaran APBA (Revisi)	-	49 skpa	-	-	-	-	-
03	01 15 008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya jumlah Qanun/pergub tentang perubahan APBA	-	49 skpa	-	-	-	-	-
03	01 15 009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBA	-	49 skpa	-	-	-	-	-
03	01 15 010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	qanun laporan pertanggung jawaban anggaran (target disesuaikan berdasarkan tahunan)	-	7 Jenis Laporan	-	-	-	-	-
03	01 15 011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	pergub tentang penjabaran pertanggung jawaban)	-	1 Peraturan Gubernur	-	-	-	-	-
03	01 15 014	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersosialisasinya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	3 Kegiatan	-	-	-	-	-
03	01 15 016	Peningkatan Manajemen Aset/Barang	Terselenggaranya penatausahaan atas BMA sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 15 017	Peningkatan manajemen investasi daerah	-	1 Dokumen Ranpergub	-	-	-	-	-	
03	01 15 019	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 027	Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana desentralisasi	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 042	Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 050	Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Keuangan Daerah	-	7 Bidang dan UPTD	-	-	-	-	-	
03	01 15 052	Pengurusan Administrasi Belanja Daerah dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 053	Peningkatan Penataan Arsip Keuangan Daerah	-	1 tahun	-	-	-	-	-	
03	01 15 057	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPA	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 060	Penyusunan dan Penganggaran SKPA	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 062	Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	
03	01 15 063	Monitoring dan Evaluasi belanja bantuan keuangan	-	5 Jenis Laporan	-	-	-	-	-	
03	01 15 065	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD)	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 066	Evaluasi, Penilaian dan manfaat serta Pelaporan Aset	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 067	Pengendalian, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 068	Kegiatan implementasi aplikasi sistem informasi gaji PNSD	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 15 069	Kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 070	Penyusunan dan penilaian pelaksanaan BLUD	-	14 BLUD	-	-	-	-	-	
03	01 15 071	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 072	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 088	Penyusunan Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh	-	49 skpa	-	-	-	-	-	
03	01 15 089	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	-	49 skpa	-	-	-	-	-	
03	01 15 090	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	-	45 Kepgub	-	-	-	-	-	
03	01 15 091	Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota	-	95 Org	-	-	-	-	-	
03	01 15 092	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	23 Kepgub	-	-	-	-	-	
03	01 15 093	Bimtek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 15 094	Pengembangan Regional SIKD	-	100%	-	-	-	-	-	
03	01 15 095	Pengurusan Administrasi Belanja Daerah	-	16.393 SP2D, 250 SPD, 218 REGISTER SP2D	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 15 096	Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas	-	152 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 0 LRT, 252 Rekonsiliasi Kas	-	-	-	-	-	-
03	01 15 097	Pengelolaan Administrasi GAJI PNSD dan Belanja Tidak Langsung	-	1178 SP2D Gaji, 880 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 1 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	-	-	-	-	-	-
03	01 15 098	Pembinaan Perbendaharaan	-	150 orang	-	-	-	-	-	-
03	01 15 099	Koordinasi, Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan	-	360 Laporan	-	-	-	-	-	-
		16 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01 16 001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota	-	Tertibnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dalam APBK	-	-	-	-	-	-
03	01 16 007	Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota	-	Terbentuknya persamaan persepsi tentang regulasi dan pedoman pengelolaan keuangan daerah secara tertib efisien dan transparan	-	-	-	-	-	-
03	01 16 008	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Tertibnya pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK	-	-	-	-	-	-
03	01 16 009	Bintek Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	-	Penyusunan APBK dan Pertanggungjawaban APBK sesuai dengan regulasi PKD	-	-	-	-	-	-
03	01 16 010	Pengembangan Regional SIKD	-	Tersedianya database keuangan daerah terintegrasi secara <i>real time</i>	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022			
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	24	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-	75%	-	-	-	-	-	
03	01	24	001	Penatausahaan Aset	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel	-	4 Laporan BMA, 48 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 4 berita acara, 1 Tahun Anggaran	-	-	-	-	-
03	01	24	002	Sensus Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah laporan pengelolaan BMA	-	-	-	-	-	-	-
03	01	24	003	Peningkatan Manajemen Aset	Jumlah laporan pengelolaan BMA	-	1 Tahun, 1 KepGub BMA	-	-	-	-	-
03	01	24	004	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).	Pergub RKBMA	-	-	-	-	-	-	-
03	01	24	005	Penghapusan Aset	Jumlah laporan aset yang dikeluarkan dari pencatatan Barang Milik Aceh	-	4286 Unit Barang	-	-	-	-	-
03	01	24	006	Pemindahtanganan Aset	Jumlah laporan legalitas perpindahtanganan aset	-	4286 Unit Barang	-	-	-	-	-
03	01	24	007	Pengamanan Aset	jumlah sertifikat kepemilikan BMA	-	12 Sertifikat, 8 PBB Asrama	-	-	-	-	-
03	01	24	008	Pemanfaatan Aset	jumlah laporan BMA yang dilakukan pemanfaatan	-	4 kegiatan	-	-	-	-	-
03	01	24	009	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang	Kepgub standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	-	-	-	-	-	-	-
			25	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ACEH	Persentase Pendapatan Asli Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh	-	-	-	-	-	-	-
03	01	25	001	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Aceh	jumlah peningkatan pendapatan asli aceh	-	1.90 Triliun	-	-	-	-	-
03	01	25	002	Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana desentralisasi	Tersedianya data dan laporan penerimaan dana desentralisasi	-	-	-	-	-	-	-
03	01	25	003	Baliho himbauan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	tersampaikan himbauan pajak di 23 kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-
03	01	25	004	Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak	database potensi objek dan subjek pajak kendaraan bermotor	-	880536 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 25 005	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD I Banda Aceh	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 006	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD II Aceh Besar	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 007	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD III Pidie	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 008	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD IV Bireuen	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 009	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD V Lhokseumawe	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 010	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD VI Aceh Utara	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 011	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD VII Aceh Timur	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 012	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD VIII Langsa	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 013	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD IX Aceh Tamiang	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 25 014	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD X Bener Meriah	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	-	-	-	-	-
03	01 25 015	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XI Aceh Tengah	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	-	-	-	-	-
03	01 25 016	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XII Gayo Lues	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Gayo Lues	-	-	-	-	-	-
03	01 25 017	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XIII Aceh Tenggara	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-
03	01 25 018	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XIV Aceh Jaya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Jaya	-	-	-	-	-	-
03	01 25 019	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XV Aceh Barat	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Barat	-	-	-	-	-	-
03	01 25 020	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVI Nagan Raya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Nagan Raya	-	-	-	-	-	-
03	01 25 021	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVII Aceh Barat Daya	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-
03	01 25 022	Penyelenggaraan Rutinitas dan kesamsatan UPTD XVIII Aceh Selatan	Teknis	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 25 023	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD XIX Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 024	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD XX Sabang	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 025	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD XXI Simeulue	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 026	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD XXII Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 027	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis kesamsatan UPTD XXIII Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 028	Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Pengelolaan Teknologi Infromasi (P2TI)	-	-	-	-	-	-	-	
03	01 25 029	Penyelarasan dan Pelaporan Penerimaan Data Desentralisasi	-	4 Laporan	-	-	-	-	-	
03	01 25 030	Sosialisasi Kebijakan Pajak dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	-	50%	-	-	-	-	-	
03	01 25 031	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD I Banda Aceh	-	156974 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 032	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD II Aceh Besar	-	115306 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 033	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD III Pidie	-	84711 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 034	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD IV Bireuen	-	99318 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 25 035	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD V Lhokseumawe	-	56445 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 036	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VI Aceh Utara	-	99824 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 037	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VII Aceh Timur	-	60363 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 038	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD VIII Langsa	-	40725 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 039	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD IX Aceh Tamiang	-	54999 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 040	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD X Bener Meriah	-	24277 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 041	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XI Aceh Tengah	-	37461 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 042	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XII Aceh Barat	-	47717 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 043	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIII Nagan Raya	-	33252 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 044	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIV Aceh Barat Daya	-	22631 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 045	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XV Aceh Selatan	-	34743 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 046	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVI Pidie Jaya	-	24375 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 047	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVII Sabang	-	11257 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03	01 25 048	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XVIII Aceh Jaya	-	15330 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 049	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XIX Subulussalam	-	9280 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 050	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XX Aceh Singkil	-	15565 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 051	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXI Gayo Lues	-	9700 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 052	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXII Aceh Tenggara	-	15589 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
03	01 25 053	penyelenggaraan pelayanan kesamsatan UPTD XXIII Simuelue	-	6997 Unit Kendaraan	-	-	-	-	-	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							-	-
5	02	KEUANGAN							-	-
5	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5	02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	-	-
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPA	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	-	-
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPA	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	-	-
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Pelayanan Jasa Pengadministrasian Kedinasan	-	-	1Tahun	1Tahun	100%	1Tahun	-	-
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	100%	31%	31%	100%		
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS	183 PNS dan 146 NON PNS	41%	400 PNS dan 400 NON PNS	-	-
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM yang Handal	-	-	348 Orang	70 Orang	20%	348 Orang	-	-
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	-	1Tahun	1Tahun	100%	1Tahun	-	-
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	-	-	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	-	-
						tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	-	-	23 UPTD	23 UPTD	100%	23 UPTD	-	-
						tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	-	-	6 UPTD	6 UPTD	100%	6 UPTD	-	-
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Adminsitirasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	-	1 Tahun dan 7 Bidang	1 Tahun dan 7 Bidang	100%	1 Tahun dan 7 Bidang	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	7 Bidang 23 UPTD	7 Bidang 23 UPTD	100%	7 Bidang 23 UPTD	-	-
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya tugas-tugas Dinas dan UPTD Kab/Kota	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	tersedianya data dan dokumen kearsipan kantor terdata dengan baik	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kendaraan untuk Operasional Kedinasan	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	-	-
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah dan gedung kantor UPTD tersedianya rehabilitasi gedung kantor	-	-	12 UPTD	12 UPTD	100%	12 UPTD	-	-
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	-	-
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran dan Kesamsatan	-	-	23 UPTD	23 UPTD	100%	23 UPTD	-	-
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	-	-	250 Kendaraan	250 Kendaraan	100%	250 Kendaraan	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun		
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	-	-	1 Gudang	1 Gudang	100%	1 Gudang	-	-
						tersedianya pemeliharaan rumah dinas			23 UPTD	23 UPTD	100%	23 UPTD		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	77%	WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	86%	WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPA	-	-	50 DPA & 50 DPPA	50 DPA & 50 DPPA	100%	50 DPA & 50 DPPA	-	-
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA dan Penjabaran APBA	-	-	1 Pergub 1 Qanun	1 Pergub 1 Qanun	100%	1 Pergub 1 Qanun	-	-
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Qanun APBA-P dan Penjabaran APBA-P	-	-	1 Qanun 2 Pergub	-	-	1 Qanun 2 Pergub	-	-
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Dokumen Aturan terkait SBU, ASB, RKI, SE Penyusunan APBA	-	-	1 RanQanun	1 RanQanun	100%	1 RanQanun	-	-
										2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	2 KepGub, 1 SE Gubernur, 3 PerGub	100%	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	-
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya WTP Kabupaten/Kota	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	98%	WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan APBK	-	-	23 kepgub	23 kepgub	100%	23 kepgub	-	-
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan perubahan APBK	-	-	23 kepgub	21 kepgub	91%	23 kepgub	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022					
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen dokumen hasil evaluasi gubernur penetapan Pertanggungjawaban APBK	-	-	23 kepgub	23 kepgub	100%	23 kepgub	-	-
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Asistensi ke Kab/kota	-	-	95 orang	95 orang	100%	95 orang	-	-
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Sosialisasi utk Kab/Kota	-	-	270 orang	270 orang	100%	270 orang	-	-
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP WTP/WDP			WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	100%	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-	-
						Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah	-	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	100%	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	-	-
						Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	-	-	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	100%	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	-	-
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan penerimaan dana transfer dan laporan pendapatan yang sah, Terselesaikannya	-	-	4 Laporan	5 KEGIATAN	100%	4 Laporan	-	-
							-	-	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	100%		-	-
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	-	-	250 BKU	250 BKU	100%	250 BKU	-	-
						Rekonsiliasi pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	-	-						
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	100%	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-
						Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara	-	-						
						Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-						
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	100%	WTP WTP/WDP	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akuntabel	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	-	-
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	-	-	1 Buku	1 PERGUB	100%	1 Buku	-	-
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	-	-
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	100%	WTP WTP/WDP	-	-
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurnya bantuan keuangan khusus	-	-	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	100%	3 Jenis Laporan	-	-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	80%	80%	117%	80%	-	-
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	80%	80%	117%	80%	-	-
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Daftar Standar Satuan Harga	-	-	1 kepgub	1 kepgub	100%	1 kepgub	-	-
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	1 kepgub	1 kepgub	100%	1 kepgub	-	-
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	koordinasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
						Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan		

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya daftar hasil revaluasi barang milik aceh	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1 kepgub BMA 2 kegiatan	100%	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Tersedianya persetujuan Pemanfaatan Barang (Sewa BMA) - Tersedianya Keputusan Hibah - Tersedianya Keputusan Penjualan - Tersedianya persetujuan Pemusnahan BMA - Tersedianya Keputusan Penghapusan BMA - Tersedianya Surat Keputusan Pengalihan Status Penggunaan	-	-	7 SK	7 SK	100%	7 SK	-	-
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	28%		100%	28%	-	-
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	28%		100%	28%	-	-
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terpenuhinya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%	23 Kab/Kota	-	-
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	-	-	1200000 Basis Data	1200000 Basis Data	100%	1200000 Basis Data	-	-
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	-	-	860000 Wajib Pajak	860000 Wajib Pajak	100%	860000 Wajib Pajak	-	-
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	pelatihan dan rapat koordinasi	-	-	4 Kegiatan	5 kegiatan	100%	4 Kegiatan	-	-
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	100%	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan	100%	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	100%	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	86 Orang	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA	13 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	257 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBA Tepat Waktu	Sesuai	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	209 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	141 orang	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya WTP Pemerintah kab/kota	926 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	23 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	23 Laporan	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022				
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	23 Laporan	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	600 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	5 Laporan	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	21 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen (SPD)	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
					Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	-	-	-	-	-	-	
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	-	-	-	-	-	-	
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	(BKU, BAR Bendahara Penerimaan, BAR Bendahara Pengeluaran, BAR NTPN,)	-	-	-	-	-	-	
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	4 Laporan	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	600 Orang	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	8 lembaga	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	37.50%	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	20%	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh	29%	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
					Analisa dan Penæmhanan Paia	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit server & 5 unit samkel	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	23 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	866000 Dokumen SKPD	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	23 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	64 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 WP PAP	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	46 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	46 kegiatan	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d 2022	
									Target Renja SKPA Tahun 2021	Realisasi Renja SKPA Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja BPKA tahun anggaran 2020 diukur berdasarkan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat outcome Pemerintah Daerah seperti yang terdapat dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan capaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBA	30,58%
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	17,12%
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	12,55%
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Belanja Langsung = 67,77% Belanja Tidak Langsung = 87,12%
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	90,88%
7	Penetapan APBA	Tidak tepat waktu

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama tahun 2017-2022 sejauh ini masih digunakan untuk Rancangan Awal rencana Tahun 2023 sampai dengan penetapan Indikator Kinerja Utama selanjutnya ditetapkan.

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Indikator Kinerja Utama 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase OPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah OPA yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan OPA	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Akuntansi
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perolehan nilai jumlah realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan Pendapatan Asli Aceh tahun lalu	PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	Penetapan hasil evaluasi APBD dan pertanggungjawaban maksimal 15 hari kerja	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan bidang Pendapatan, Anggaran, Barang dan Kekayaan Milik Aceh, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pembinaan serta Evaluasi Anggaran Kabupaten/kota sesuai Peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- k. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- m. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- o. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- p. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- q. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
- r. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
- s. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
- t. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- u. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKA sebagaimana tersebut diatas Kepala Badan diberikan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
- b. Pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Anggaran;
- f. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Perbendaharaan;
- h. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang Akuntansi;
- i. Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan aceh;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- l. Pengkoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Aceh;
- m. Pengkoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBA;
- n. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- o. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
- p. Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- q. Pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- r. Pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan Aceh;
- s. Pengkoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- t. Pengkoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- u. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Aceh;
- v. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan Aceh;
- w. Pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan Aceh;
- x. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian Aceh;
- y. Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- z. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- aa. Pengendalian dan Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- bb. Pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik Aceh;
- cc. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- dd. Pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- ee. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- ff. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Mewujudkan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 dengan menganalisa dan memperhatikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka:

- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Informasi analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disajikan adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan dan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai gambaran/cerminan sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap pencapaian target-target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA
PROVINSI ACEH

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	-	-	100%	-	-	-	82%	-	-	-	-
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	-	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-
2	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	-	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-
3	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas-tugas perkantoran	-	-	184 Unit	-	-	-	158 Unit	-	-	-	-
4	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	-	-	7 Bidang	-	-	-	7 Bidang	-	-	-	-
5	Terlaksananya Adminstrasi Perkatoran	-	-	1690 Rim Kertas, 657 Kotak Kertas Continous Form, 2075 Map, 626 toner, 3 harddisk	-	-	-	1500 Rim Kertas, 471 Kotak Kertas Continous Form, 1500 Map, 1500 toner, 3 harddisk	-	-	-	-
6	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	6 jenis	-	-	-	6 jenis	-	-	-	-
7	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	-	6 gedung	-	-	-	6 gedung	-	-	-	-
8	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk penunjang administrasi	-	-	41 Jenis	-	-	-	73 Jenis	-	-	-	-
9	tersedianya keperluan bahan bacaan harian dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	-	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-
11	Terlaksananya tugas-tugas dinas	-	-	1 tahun	-	-	-	9 bulan	-	-	-	-
12	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor	-	-	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-
13	Jumlah Aset yang keluar dari pencatatan KIP BPKA	-	-	750 Unit Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	-	-	-	77%	-	-	-	-
1	Tersedianya Rumah Dinas bagi aparatur yang bertugas di UPTD	-	-	6 rumah	-	-	-	4 rumah	-	-	-	-
2	Adanya dokumen perencanaan dan tersedianya tanah untuk pembangunan UPTD dan SAMSAT	-	-	39 DED, 23 gedung, 24 bangunan lainnya	-	-	-	4 DED, 12 gedung, 3 bangunan lainnya	-	-	-	-
3	Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	-	-	8 Unit	-	-	-	7 Unit	-	-	-	-
4	Terciptanya Pelaksanaan Kegiatan, terciptanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	100%	-	-	-	98.47%	-	-	-	-
5	Terselenggaranya pelayanan prima	-	-	100%	-	-	-	88.31%	-	-	-	-
6	Tersedianya dan Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan kantor Sebagai Pendukung Operasional Kantor	-	-	2 Komp virtualisasi 2 ipad 157 Komputer	-	-	-	5 komp virtualisasi, 2 ipad, 122 komputer	-	-	-	-
7	Rumah dinas yang layak huni	-	-	100%	-	-	-	15%	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
8	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	3 gedung	-	-	-	3 gedung	-	-	-	-
9	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	100%	-	-	-	89%	-	-	-	-
10	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kedinasan	-	-	100%	-	-	-	79%	-	-	-	-
11	Rumah huni yang layak huni	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
12	Terjaganya gedung kantor	-	-	18 bangunan, 4 penimbunan	-	-	-	20 bangunan, 3 penimbunan	-	-	-	-
13	Kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas kantor	-	-	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
1	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	383 Pasang	-	-	-	423 Pasang	-	-	-	-
3	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	2 jenis	-	-	-	2 jenis	-	-	-	-
	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	-	-	100%	-	-	-	9%	-	-	-	-
1	SDM yang Handal	-	-	348 orang	-	-	-	30 orang	-	-	-	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (lakip, renja, laporan keuangan, laporan realisasi, dll di bagi dengan total laporan wajib)	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
1	Tersedianya laporan keuangan	-	-	2 jenis laporan	-	-	-	2 Jenis Laporan	-	-	-	-
2	Adanya pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan	-	-	94 kegiatan	-	-	-	97 kegiatan	-	-	-	-
3	Tersedianya laporan kinerja Keuangan tahunan	-	-	5 jenis laporan	-	-	-	5 Jenis Laporan	-	-	-	-
4	Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersifat tahunan maupun lima tahunan serta tersedianya ukuran dari capaian dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan	-	-	10 dokumen	-	-	-	10 dokumen	-	-	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	WTP Laporan Keuangan	-	-	-	WTP Laporan Keuangan	-	-	-	-
1	tersusunnya jumlah dokumen pergub analisa standar belanja pemerintah Aceh	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
3	Tersusunnya jumlah Qanun/Pergub tentang APBA	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
4	Tersusunnya jumlah Pergub tentang penjabaran APBA dan tersusunnya Pergub tentang Perubahan Pergub tentang Penjabaran APBA (Revisi)	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
5	Tersusunnya jumlah Qanun/pergub tentang perubahan APBA	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
6	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBA	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
7	qanun laporan pertanggung jawaban anggaran (target disesuaikan berdasarkan tahunan)	-	-	7 Jenis Laporan	-	-	-	7 Jenis Laporan	-	-	-	-
8	pergub tentang penjabaran pertanggung jawaban)	-	-	1 Peraturan Gubernur	-	-	-	1 Peraturan Gubernur	-	-	-	-
9	Tersosialisasinya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	5 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	-	-	-	-
10	Tersusunnya jumlah Pergub Rencana Kerja Investasi dan Dokumen Analisis terhadap Rencana Investasi Pemerintah Aceh	-	-	1 Dokumen Ranpergub	-	-	-	1 Dokumen Ranpergub	-	-	-	-
11	Jumlah laporan ketatausahaan	-	-	7 Bidang dan UPTD	-	-	-	7 Bidang dan UPTD	-	-	-	-
13	jumlah dokumen arsip yang tertibkan	-	-	1 tahun	-	-	-	1 tahun	-	-	-	-
14	Jumlah Aplikasi dan Modul	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	-	-	-	-
15	jumlah laporan hasil bantuan keuangan kab/kota yang termonitoring	-	-	5 Jenis Laporan	-	-	-	5 Jenis Laporan	-	-	-	-
16	Tersusunnya jumlah Pergub/Kepgub tentang OPA/unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD	-	-	7 BLUD	-	-	-	14 BLUD	-	-	-	-
17	Tersusunnya jumlah Pergub tentang Standar Biaya Umum untuk Penyusunan RKA-SKPA	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
18	Tersusunnya jumlah Dokumen KUA dan PPAS serta Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBA	-	-	49 skpa	-	-	-	49 skpa	-	-	-	-
19	jumlah dokumen hasil evaluasi APBK kab/kota	-	-	46 KepGub	-	-	-	45 Keppgub	-	-	-	-
20	jumlah rakor tentang evaluasi pedoman pengelolaan keuangan daerah	-	-	95 orang	-	-	-	95 Org	-	-	-	-
21	jumlah laporan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi	-	-	23 KepGub	-	-	-	23 Keppgub	-	-	-	-
23	jumlah dokumen digital APBD kab/kota yang tersedia pada sistem SIKD	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
24	jumlah dokumen SP2D / penerbitan SP2D	-	-	30 SP2D, 300 SPD, 250 REGISTER SP2D	-	-	-	16.393 SP2D, 250 SPD, 218 REGISTER SP2D	-	-	-	-
25	jumlah laporan validasi dan entri data	-	-	250 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 1 LRT, 250 Rekonsiliasi Kas	-	-	-	152 BKU, 12 Posisi Kas, 12 Ringkasan Realisasi, 12 Realisasi APBA, 4 LKT, 0 LRT, 252 Rekonsiliasi Kas	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
26	dokumen administrasi penggajian PNSD	-	-	1000 SP2D Gaji, 800 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 3 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	-	-	-	1178 SP2D Gaji, 880 SKPP, 12 Rekapitulasi Pajak, 1 Potongan Pihak Ketiga, 4 Potongan FPK, 12 Potongan Taperum	-	-	-	-
27	jumlah bendahara yang bersertifikat bendahara	-	-	150 orang	-	-	-	150 orang	-	-	-	-
28	jumlah laporan rekonsiliasi dan konsolidasi	-	-	360 Laporan	-	-	-	360 Laporan	-	-	-	-
	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah			60%	-	-	-	75%	-	-	-	-
1	Jumlah laporan data BMA yang akuntabel	-	-	2 Laporan BMA, 47 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 2 berita acara, 1 Tahun Anggaran	-	-	-	4 Laporan BMA, 48 buku inventaris SKPA, 1 tahun anggaran, 4 berita acara, 1 Tahun Anggaran	-	-	-	-
2	Jumlah laporan pengelolaan BMA	-	-	1 Tahun, 1 KepGub BMA	-	-	-	1 Tahun, 1 KepGub BMA	-	-	-	-
3	Pergub RKBMA	-	-	1 kali kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah laporan aset yang dikeluarkan dari pencatatan Barang Milik Aceh	-	-	4286 Unit Barang	-	-	-	4286 Unit Barang	-	-	-	-
5	Jumlah laporan legalitas perpindahtanganan aset	-	-	4286 Unit Barang	-	-	-	4286 Unit Barang	-	-	-	-
6	jumlah sertifikat kepemilikan BMA	-	-	10 Sertifikat, 8 PBB Asrama	-	-	-	12 Sertifikat, 8 PBB Asrama	-	-	-	-
7	jumlah laporan BMA yang dilakukan pemanfaatan	-	-	1 kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	-
8	Kepgub standar satuan harga barang dan jasa dan standar satuan harga barang bangunan dan jasa	-	-	2 Keputusan Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pendapatan Asli Aceh Terhadap Total Pendapatan Aceh	-	-	Persentase PAA 16.51% dari pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	jumlah peningkatan pendapatan asli aceh	-	-	2.18 Triliun	-	-	-	1.90 Triliun	-	-	-	-
4	database potensi objek dan subjek pajak kendaraan bermotor	-	-	1 Laporan	-	-	-	880536 Unit Kendaraan	-	-	-	-
28	Terwujudnya pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Laporan Penerimaan dana desentralisasi	-	-	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	-
30	Jumlah Sosialisasi pajak Aceh yang dilaksanakan	-	-	50%	-	-	-	50%	-	-	-	-
31	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD I Banda Aceh	-	-	188361 Unit Kendaraan	-	-	-	156974 Unit Kendaraan	-	-	-	-
32	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD II Aceh Besar	-	-	75032 Unit Kendaraan	-	-	-	115306 Unit Kendaraan	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
33	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD III Pidie	-	-	80351 Unit Kendaraan	-	-	-	84711 Unit Kendaraan	-	-	-	-
34	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IV Bireuen	-	-	49719 Unit Kendaraan	-	-	-	99318 Unit Kendaraan	-	-	-	-
35	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD V Lhokseumawe	-	-	63434 Unit Kendaraan	-	-	-	56445 Unit Kendaraan	-	-	-	-
36	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VI Aceh Utara	-	-	75314 Unit Kendaraan	-	-	-	99824 Unit Kendaraan	-	-	-	-
37	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VII Aceh Timur	-	-	37789 Unit Kendaraan	-	-	-	60363 Unit Kendaraan	-	-	-	-
38	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD VIII Langsa	-	-	35776 Unit Kendaraan	-	-	-	40725 Unit Kendaraan	-	-	-	-
39	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD IX Aceh Tamiang	-	-	46053 Unit Kendaraan	-	-	-	54999 Unit Kendaraan	-	-	-	-
40	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD X Bener Meriah	-	-	21066 Unit Kendaraan	-	-	-	24277 Unit Kendaraan	-	-	-	-
41	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XI Aceh Tengah	-	-	37588 Unit Kendaraan	-	-	-	37461 Unit Kendaraan	-	-	-	-
42	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XII Aceh Barat	-	-	44073 Unit Kendaraan	-	-	-	47717 Unit Kendaraan	-	-	-	-
43	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIII Nagan Raya	-	-	26793 Unit Kendaraan	-	-	-	33252 Unit Kendaraan	-	-	-	-
44	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIV Aceh Barat Daya	-	-	22277 Unit Kendaraan	-	-	-	22631 Unit Kendaraan	-	-	-	-
45	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XV Aceh Selatan	-	-	23423 Unit Kendaraan	-	-	-	34743 Unit Kendaraan	-	-	-	-
46	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVI Pidie Jaya	-	-	21090 Unit Kendaraan	-	-	-	24375 Unit Kendaraan	-	-	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
47	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVII Sabang	-	-	2356 Unit Kendaraan	-	-	-	11257 Unit Kendaraan	-	-	-	-
48	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XVIII Aceh Jaya	-	-	15378 Unit Kendaraan	-	-	-	15330 Unit Kendaraan	-	-	-	-
49	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XIX Subulussalam	-	-	7372 Unit Kendaraan	-	-	-	9280 Unit Kendaraan	-	-	-	-
50	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XX Aceh Singkil	-	-	16685 Unit Kendaraan	-	-	-	15565 Unit Kendaraan	-	-	-	-
51	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXI Gayo Lues	-	-	5807 Unit Kendaraan	-	-	-	9700 Unit Kendaraan	-	-	-	-
52	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXII Aceh Tenggara	-	-	11862 Unit Kendaraan	-	-	-	15589 Unit Kendaraan	-	-	-	-
53	Terwujudnya Pelayanan Samsat yang Prima terhadap objek Pajak pada Wilayah UPTD XXIII Simuelue	-	-	5696 Unit Kendaraan	-	-	-	6997 Unit Kendaraan	-	-	-	-
	PERSENTASE LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN YANG TERSUSUN TEPAT WAKTU (LAKIP, RENJA, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI, DLL DIBAGI DENGAN TOTAL LAPORAN WAJIB	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Tahunan maupun Lima Tahunan	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-	-
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-	-
	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-	24 Dokumen	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
2	Tersajinya Laporan Keuangan SKPA	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-	-
3	Tersusunnya Laporan Keuangan	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Tersedianya Pelayanan Jasa Pengadministrasian Kedinasan	-	-	-	1Tahun	1Tahun	-	-	-	1Tahun	-	-
	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Terwujudnya keseragaman pemakaian seragam dinas	-	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS	400 PNS dan 400 NON PNS	-	-	-	400 PNS dan 400 NON PNS	-	-
2	SDM yang Handal	-	-	-	348 Orang	348 Orang	-	-	-	348 Orang	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Terpenuhinya kebutuhan Kelistrikan gedung kantor	-	-	-	1Tahun	1Tahun	-	-	-	1Tahun	-	-
2	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor BPKA	-	-	-	1 Gedung	1 Gedung	-	-	-	1 Gedung	-	-
3	tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Samsat	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	-	23 UPTD	-	-
4	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	-	-	-	6 UPTD	6 UPTD	-	-	-	6 UPTD	-	-
5	Terlaksananya Adminsitrası Perkantoran	-	-	-	7 Bidang dan 23 UPTD	7 Bidang dan 23 UPTD	-	-	-	7 Bidang dan 23 UPTD	-	-
6	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
7	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor	-	-	-	7 Bidang 23 UPTD	7 Bidang 23 UPTD	-	-	-	7 Bidang 23 UPTD	-	-
8	Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
9	Terlaksananya tugas-tugas Dinas dan UPTD Kab/Kota	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
10	tersedianya data dan dokumen kearsipan kantor terdata dengan baik	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	tersedianya kendaraan dinas operasional	-	-	-	58 Unit	2 Unit	-	-	-	2 Unit	-	-
2	tersedianya Pembangunan dan rehabilitasi rumah dan gedung kantor UPTD	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	-	23 UPTD	-	-
3	tersedianya rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	1 Gedung BPKA	1 Gedung BPKA	-	-	-	1 Gedung BPKA	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Terlaksananya administrasi perkantoran	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
2	Terpenuhinya Pelayanan administrasi kantor	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
3	tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
4	Kebersihan kantor badan dan gudang arsip	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	-	23 UPTD	-	-
5	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perkantoran dan Kesamsatan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	-	-
1	Terjaganya kendaraan dinas, terlaksananya tugas- tugas perkantoran	-	-	-	250 Kendaraan	250 Kendaraan	-	-	-	250 Kendaraan	-	-
2	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
3	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	-	-
4	tersedianya pemeliharaan rumah dinas	-	-	-	23 UPTD	23 UPTD	-	-	-	23 UPTD	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
1	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-	-
2	Tersusunnya Dokumen KUA PPAS-P	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-	-
3	Tersusunnya DPA SKPA dan perubahan DPA SKPA	-	-	-	50 DPA & 50 DPPA	50 DPA & 50 DPPA	-	-	-	50 DPA & 50 DPPA	-	-
4	Tersusunnya jumlah qanun tentang APBA dan pergub aceh tentang penjabaran APBA	-	-	-	1 Pergub 1 Qanun	1 Pergub 1 Qanun	-	-	-	1 Pergub 1 Qanun	-	-
5	Tersusunnya Jumlah Qanun tentang perubahan APBA dan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran perubahan APBA	-	-	-	1 Qanun 2 Pergub	1 Qanun 2 Pergub	-	-	-	1 Qanun 2 Pergub	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	-	-	-	2 KepGub, 2 SE Gubernur, 3 PerGub	-	-
	Tercapainya WTP Kabupaten/Kota	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
1	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan APBK	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	-	23 kepgub	-	-
2	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	-	23 kepgub	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
3	tersedianya dokumen hasil evaluasi keputusan gubernur sebagai dasar penetapan perubahan APBK	-	-	-	23 kepgub	23 kepgub	-	-	-	23 kepgub	-	-
4	terwujudnya pemahaman aparaturnya keuangan daerah dan terintegrasi data pengelolaan keuangan kab/kota berbasis aplikasi	-	-	-	95 orang	95 orang	-	-	-	95 orang	-	-
5	meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	270 orang	270 orang	-	-	-	270 orang	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
1	Penyelesaian Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-	-	-	4 Jenis Laporan, 1800 SP2D dan SKPP	-	-
2	Terselesaikannya Administrasi Belanja Daerah	-	-	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	-	-	-	250 Register SP2D dan 40000 SP2D	-	-
3	Terselesaikannya Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	-	-	-	1 SK dan 250 Rekonsiliasi	-	-
4	Laporan Penerimaan Dana Desentralisasi	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	-	-
5	Terselesaikannya Administrasi Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	-	-	-	6 Jenis Laporan	-	-
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	-	-	-	250 BKU	250 BKU	-	-	-	250 BKU	-	-
7	Terselesaikannya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan, Bendahara yang memiliki Sertifikat Bendahara, Peningkatan Pemahaman tentang Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-	-	3 Draft Pergub/ SE Gub dan 80 Draft SK PA/KPA	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
1	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA (LRA, Neraca, Arus Kas, LO, LPE, LPSAL dan CaLK)	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-	-
2	Laporan Keuangan Akuntabel	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-
3	Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh	-	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	-	1 Buku	-	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
4	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-	5 Kegiatan	-	-
	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	-	-	-	WTP WTP/WDP	WTP WTP/WDP	-	-	-	WTP WTP/WDP	-	-
1	Terlaksananya kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tersalurinya bantuan keuangan khusus	-	-	-	3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	-	-	-	3 Jenis Laporan	-	-
	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	-	80%	80%	-	-	-	80%	-	-
	Rasio nilai barang milik daerah yang clear & clean per total barang milik daerah	-	-	-	80%	80%	-	-	-	80%	-	-
1	Daftar Standar Satuan Harga	-	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-	-	-	1 kepgub	-	-
2	Daftar Hasil telaahan dan pembahasan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	1 kepgub	1 kepgub	-	-	-	1 kepgub	-	-
3	Peningkatan kualitas SDM	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-
4	Tersedianya bukti kepemilikan BMA	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-
5	Tersedianya Tanda Kepemilikan Tanah	-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-
6	daftar hasil revaluasi barang milik aceh	-	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-	-	1 kepgub BMA 2 kegiatan	-	-
7	- Tersedianya persetujuan Pemanfaatan Barang (Sewa BMA) - Tersedianya Keputusan Hibah - Tersedianya Keputusan Penjualan - Tersedianya persetujuan pemusnahan BMA - Tersedianya Keputusan Penghapusan BMA - Tersedianya Surat Keputusan Pengalihan Status Penggunaan	-	-	-	7 SK	7 SK	-	-	-	7 SK	-	-
	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	-	28%	28%	-	-	-	28%	-	-
	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap total pendapatan Aceh	-	-	-	28%	28%	-	-	-	28%	-	-
1	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	-	-	-	23 Kab/Kota	-	-
2	Termutakhirnya basis data pajak dan retribusi Aceh	-	-	-	1200000 Basis Data	1200000 Basis Data	-	-	-	1200000 Basis Data	-	-
3	Terwujudnya Pelayanan Samsat Yang Prima	-	-	-	860000 Wajib Pajak	860000 Wajib Pajak	-	-	-	860000 Wajib Pajak	-	-
4	pelatihan dan rapat koordinasi	-	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	4 Kegiatan	-	-
1	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	-	-	95%	-	-	-	95%	-
1	Tingkat Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	10 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	-
2	Tertibnya Administrasi Keuangan	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	371 Orang/Bulan	-	-	-	371 Orang/Bulan	-
2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
4	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-
1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	86 Orang	-	-	-	86 Orang	-
5	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	-
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	-	-	-	2 Paket	-
3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Paket	-	-	-	4 Paket	-
4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Paket	-	-	-	12 Paket	-
5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 Paket	-	-	-	10 Paket	-
6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
6	Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA	-	-	-	-	-	13 Unit	-	-	-	13 Unit	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Unit	-	-	-	3 Unit	-
2	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	10 Unit	-	-	-	10 Unit	-
7	Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA	-	-	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	-
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
8	Jumlah Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	257 Unit	-	-	-	257 Unit	-
1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	250 Unit	-	-	-	250 Unit	-
2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	7 Unit	-	-	-	7 Unit	-
II	Penetapan APBA Tepat Waktu	-	-	-	-	-	Sesuai	-	-	-	Sesuai	-
1	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	209 Dokumen	-	-	-	209 Dokumen	-
1	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
2	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
3	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	47 Dokumen	-	-	-	47 Dokumen	-
4	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	47 Dokumen	-	-	-	47 Dokumen	-
5	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	47 Dokumen	-	-	-	47 Dokumen	-
6	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	-	-	47 Dokumen	-	-	-	47 Dokumen	-
7	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
8	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	-
9	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen	-
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
11	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
13	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	141 orang	-	-	-	141 orang	-
2	tercapainya WTP Pemerintah kab/kota	-	-	-	-	-	926 Dokumen	-	-	-	926 Dokumen	-
1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
2	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
4	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	-	-	-	-	-	600 Dokumen	-	-	-	600 Dokumen	-
5	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	-	-	-	-	-	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
6	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	50 Orang	-	-	-	50 Orang	-
3	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	21 Dokumen	-	-	-	21 Dokumen	-
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	-	-	-	-	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen	-
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen (SPD)	-	-	-	1 Dokumen (SPD)	-
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	-	-	-	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
5	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PEK)	-	-	-	-	-	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	-	-	-	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	-
6	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-	-	-	-	(BKU, BAR Bendahara Penerimaan, BAR Bendahara Pengeluaran, BAR NTPN,)	-	-	-	(BKU, BAR Bendahara Penerimaan, BAR Bendahara Pengeluaran, BAR NTPN,)	-
7	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-
4	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	-
1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-
2	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-
3	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
4	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
5	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	-
6	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
7	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	600 Orang	-	-	-	600 Orang	-
8	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	-	-	-	-	-	8 lembaga	-	-	-	8 lembaga	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
5	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	-
1	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
2	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
III	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	37.50%	-	-	-	37.50%	-
1	Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh	-	-	-	-	-	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	-	-	-	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	-
1	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
2	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
3	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	3 Laporan	-	-	-	3 Laporan	-
4	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
5	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-
6	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-	-	5 Dokumen	-
IV	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	20%	-
1	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh	-	-	-	-	-	29%	-	-	-	29%	-
1	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
2	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-
3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 Unit server & 5 unit samkel	-	-	-	2 Unit server & 5 unit samkel	-
5	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
6	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-
7	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	866000 Dokumen SKPD	-	-	-	866000 Dokumen SKPD	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
8	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	-	-	-	-	-	23 Laporan	-	-	-	23 Laporan	-
9	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	64 Dokumen	-	-	-	64 Dokumen	-
10	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	-	-	-	-	82 WP PAP	-	-	-	82 WP PAP	-

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
11	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-
12	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	-	-	-	-	-	46 kegiatan	-	-	-	46 kegiatan	-
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	46 kegiatan	-	-	-	46 kegiatan	-
13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-
14	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

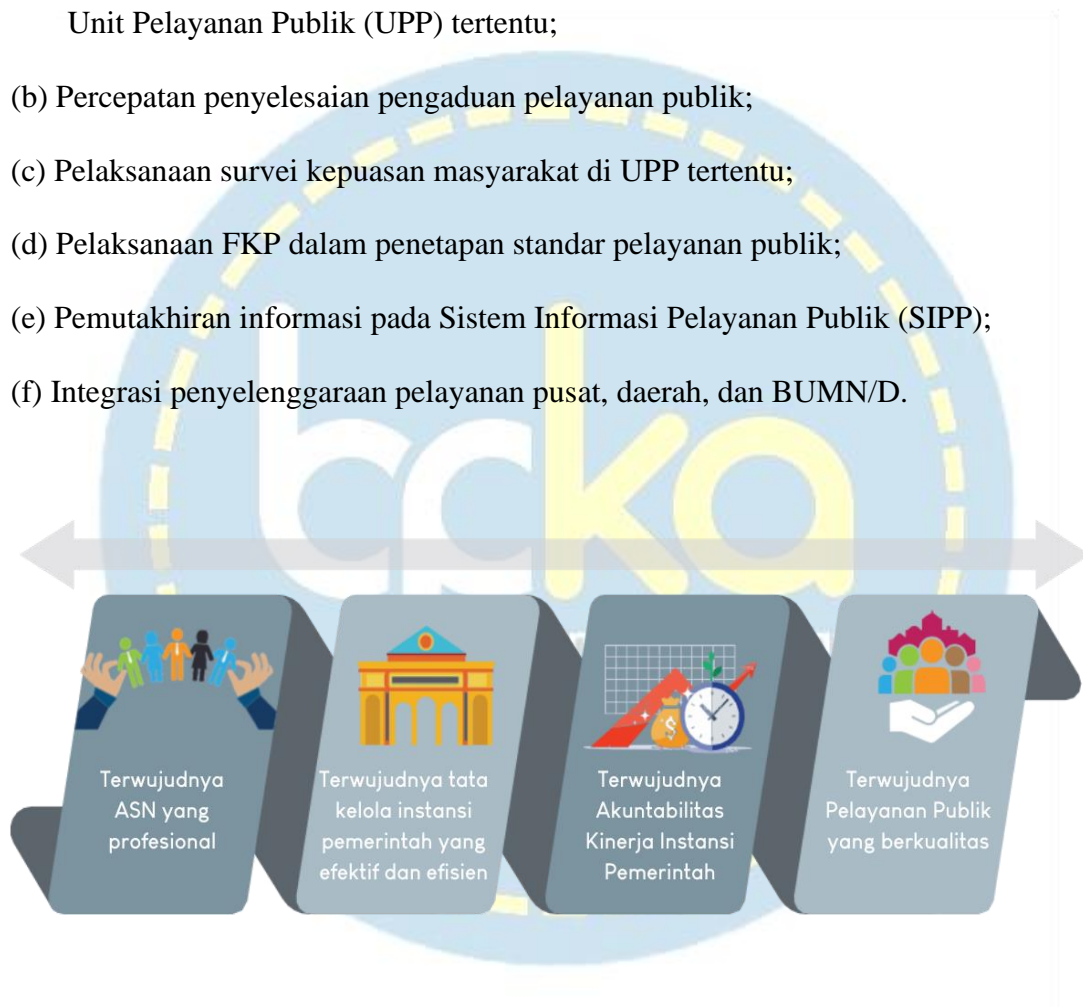
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui :
 - (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah;
 - (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN;
 - (c) Penyusunan pola karir instansional.
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan proses bisnis instansi;
 - (b) implementasi arsitektur SPBE instansi;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
- 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
 - (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
 - (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu;
 - (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik;
 - (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu;
 - (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik;
 - (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.



Gambar : Sasaran Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sinergitas program dan arah kebijakan Kementerian Keuangan untuk Provinsi Aceh adalah pada pemberian alokasi dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus,

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

sedangkan untuk sinergitas program dan arah kebijakan dengan Pemerintah kabupaten/kota kami mengambil *sample* pada beberapa kab/kota saja, yaitu:

1. BPKD Kota Sabang, arah kebijakan serta program yang beririsan antara BPKA dengan BPKD kota Sabang terdapat pada keinginan bersama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pengelola aset daerah;
2. BPKD Kab.Aceh Barat, tujuan sasaran dan program kerja yang beririsan dengan BPKD Kab. Aceh Barat berada pada meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta pada tata pengelolaan dan pemanfaatan Bangunan Milik Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, maka peran BPKA sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset Aceh mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBA namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya BPKA mengalami beberapa permasalahan seperti tersebut pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana	Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

		pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat	pembangunan sarana perkantoran
		Terbatasnya sarana dan prasarana pada layanan unggulan <i>Drive Thru</i>	Sering terjadi kemacetan di sekitar KB Samsat Banda Aceh
2	Sumber Daya Manusia	Masih kurangnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan, pelaporan, asset, pendapatan dan penganggaran	Kualitas sumber daya manusia masih kurang pada sektor kesamsatan, pelaporan, asset, pendapatan dan penganggaran
		Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada samsat	Kurangnya jumlah pegawai yang tersedia terutama yang terdapat pada samsat
3	Kelembagaan	Struktur organisasi BPKA yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas asset, serta informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017	Tugas dan fungsi BPKA yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 Dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir keseluruhan tugas yang ada di BPKA terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017
4	Regulasi	Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri	Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

		Belum lengkapnya sistem dan prosedur (sisdur), serta SOP tentang pengelolaan keuangan, aset dan penganggaran serta penatausahaan	Belum lengkapnya sistem dan prosedur (sisdur) pengelolaan keuangan serta SOP
5	Kemandirian Daerah	Pendapatan aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan transfer	Persentase pendapatan aceh tidak sebanding dengan belanja yang mengakibatkan Aceh masih bergantung pada pemerintah pusat
		Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor	Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor
		Pelaksanaan Pajak Progresif masih terkendala	Pemilik kendaraan bermotor masih belum melengkapi KTP pemilik kendaraan bermotor

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) masalah pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yaitu :

- (1) Sarana dan Prasarana, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat, yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Sumber Daya Manusia, kurangnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor pelaporan keuangan, asset, pendapatan dan penganggaran serta evaluasi APBD kab/kota sehingga perlu untuk lebih

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

meningkatkan kualitas aparatur serta jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada kesamsatan;

- (3) Kelembagaan, struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas asset, informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017;
- (4) Regulasi, banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri dan belum lengkapnya sistem dan prosedur pengeloan keuangan dan SOP sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- (5) Kemandirian Daerah, pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang harus dibiayai setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer dilain sisi juga masih terdapat potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor.

Faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tim kerja yang solid serta sudah diterapkannya manajemen yang rapi dan modern yang berbasis aplikasi teknologi informasi sehingga dapat menjamin transparansi dan efektifitas pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum mencukupinya jumlah pegawai yang berada di unit pelaksana teknis daerah serta sarana dan prasarana yang masih minim.

BPKA diantaranya mempunyai tugas dalam melakukan Pengelola Aset Aceh, Perumusan kebijakan tentang Pendapatan Daerah, pemungutan pajak aceh memiliki unit pelaksana teknis daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kab/kota di Aceh, salah satu tugas dan fungsi UPTD tersebut adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana yang representatif bagi masyarakat sangatlah wajib untuk dipenuhi. Setiap tahunnya perlu dilakukan terus menerus pembenahan pada sektor pelayanan seperti ruang tunggu wajib pajak yang ber AC, representatif untuk segala usia, responsif gender, dan sarana pelaksanaan tugas yang memadai.

Berdasarkan kinerja pelayanan di atas dapat diinventarisasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan masih butuh peningkatan;
- b. Sumber daya yang tersedia baik kualitas dan kuantitasnya masih kurang;
- c. Ada beberapa bidang dan UPTD yang strukturnya belum bisa menyelesaikan beban dan tanggungjawab yang diberikan;
- d. Pendapatan Asli Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kebutuhan belanja pemerintah Aceh;
- e. Tertib administrasi kepemilikan aset masih harus terus ditingkatkan;
- f. Pengamanan aset pemerintah Aceh baik administrasi maupun fisiknya harus terus diperkuat;
- g. Menemukan sumber-sumber pendapatan terbaru dalam rangka mempersiapkan berakhirnya alokasi dana otonomi khusus.

Kemungkinan beberapa peluang yang dapat dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan kontinuitas pelayanan terbaik;
- b. Tersedianya sistem informasi yang komprehensif dan integratif dalam Pengelolaan keuangan;
- c. Mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan, baik itu sumber baru ataupun yang lama;

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

- d. Memanfaatkan database kendaraan bermotor untuk dapat meningkatkan pendapatan pada sektor PKB maupun BBNKB;
- e. Status aset Pemerintah Aceh telah terdata dengan baik, sehingga perlu terus ditingkatkan pengelolaannya dan pengamanan terhadap aset tersebut;
- f. Terdapat aset-aset pemerintah Aceh yang ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;

Isu-isu penting dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih kurangnya kualitas SDM aparatur yang dibutuhkan di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan, perencanaan, pelaporan, aset, pendapatan dan penganggaran;
- c. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada UPTD;
- d. Struktur organisasi BPKA yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas aset, pendapatan, informasi teknologi dan bidang anggaran terutama setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri terutama peralihan kewenangan terhadap SMA dan SMK yang dulu menjadi kewenangan kab/kota sekarang menjadi kewenangan Provinsi;

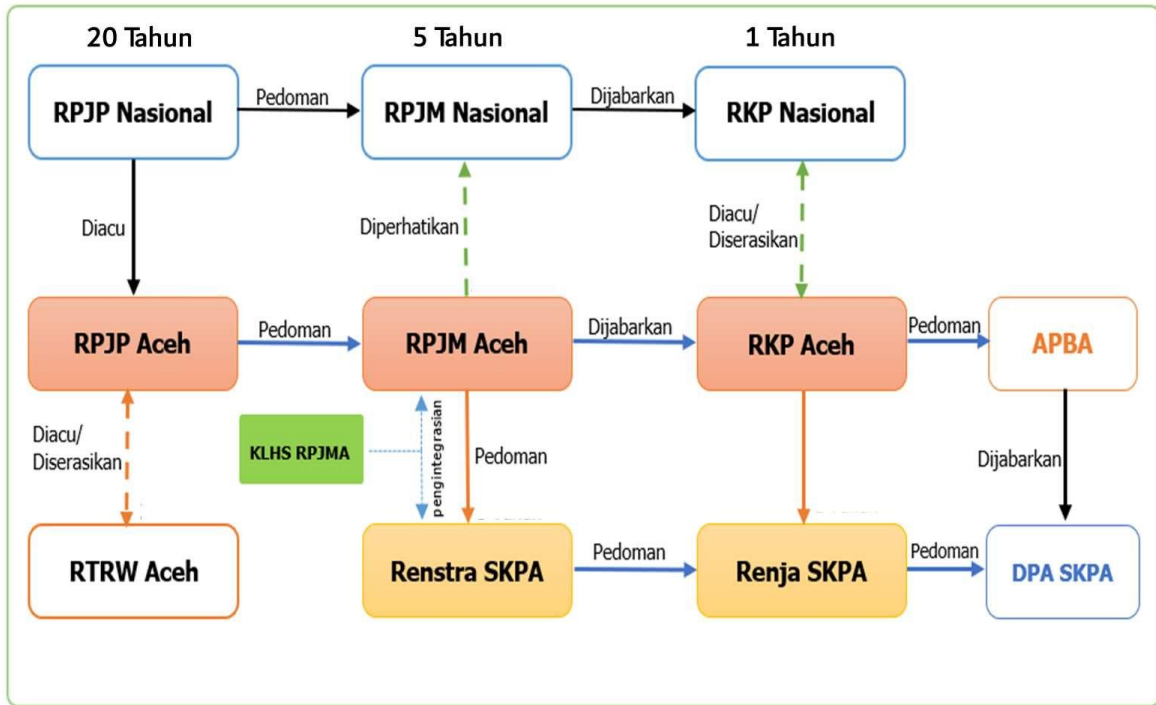
- f. Belum lengkapnya payung hukum dalam pelaksanaan tugas seperti SOP dan sistem serta prosedur pengeloaan keuangan;
- g. Pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer;
- h. Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor;
- i. Diperlukan objek baru pada sektor pendapatan demi mempersiapkan diri dari ketergantungan daerah pada pendapatan yang bersumber dari otsus;
- j. Implementasi transaksi non tunai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Dokumen rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPA yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai.

Rencana Kerja bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuannya apabila didukung dengan perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah dimaksud di antaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rancangan Awal Rencana kerja 2023



HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dari Rancangan Awal RKPA berjalan secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan, sehingga ketika ranwal RKPA telah ditetapkan maka seluruh Perangkat Daerah perlu melakukan perbandingan-perbandingan antara ranwal renja yang telah disusun dengan Rancangan Awal RKPA yang telah ditetapkan, guna menghindari inkonsistensi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan perangkatnya, dan Rencana Kerja BPKA sudah sinkron tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPA. Informasi review terhadap rancangan awal RKPA dapat dilihat pada tabel 2.4.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2023
PROVINSI ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

162,825,561,325

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95%	159,134,319,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	100%	2,868,459,463	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,261,586,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,606,873,463	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tertibnya Administrasi Keuangan	100%	96,123,264,058	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	371 Orang/Bulan	94,294,992,689	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA, DAU	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	921,392,825	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	906,878,544	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA	1 Laporan	2,079,982,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,079,982,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	100%	1,900,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	576,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	86 Orang	1,324,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	18,685,023,308	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,624,472,760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,478,478,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	203,000,891	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,426,675,329	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	957,646,028	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,803,250,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1,151,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA	13 Unit	10,147,225,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3,145,065,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	7,002,160,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA	4 Laporan	23,451,806,719	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	320,970,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7,175,361,140	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					PAA	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,564,422,680	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13,391,052,899	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Barang Milik Daerah	257 Unit	3,878,059,072	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	2,906,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	971,159,072	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Penetapan APBA Tepat Waktu	Sesuai	2,143,780,814,617	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					PAA	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	209 Dokumen	11,310,927,580	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,669,583,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	578,949,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					PAA	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	475,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	650,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					PAA	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	775,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	250,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2,182,664,700	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	224,243,460	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	2,000,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	150,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	224,243,460	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	331,243,460	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	141 orang	1,800,000,000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tercapainya WTP Pemerintah kab/kota	926 Dokumen	6,129,721,800	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	23 Laporan	1,086,806,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	23 Laporan	836,212,500	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	23 Laporan	844,942,500	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	600 Dokumen	1,373,029,800	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
5	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	5 Laporan	1,138,731,000	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	850,000,000	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	21 Dokumen	9,134,332,450	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	2,822,559,300	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen (SPD)	75,000,000.00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	1,751,893,700	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	500,000,000.00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	100,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	(BKU, BAR Bendahara Penerimaan, BAR Bendahara Pengeluaran, BAR NTPN,)	1,905,481,450	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	1,979,398,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	4 Laporan	11,878,211,564	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	1,000,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	1,000,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1,800,000,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	2,500,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 dokumen	500,000,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2,500,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	600 Orang	1,578,211,564	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	8 lembaga	1,000,000,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	3 Laporan	2,105,327,621,223	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				OA	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	879,327,503,289	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				OA	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	471,296,346,839	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				OA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	754,703,771,095	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				OA	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	37.50%	14,074,713,699	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	14,074,713,699	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
1	Penyusunan Standar Harga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1,133,659,339	Penyusunan Standar Harga	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1,338,030,141	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	4,867,126,173	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3,546,231,002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
5	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1,165,512,135	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	2,024,154,909	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	20%	33,178,134,167	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA, PPR, HIBAH	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh	29%	33,178,134,167	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA, PPR, HIBAH	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	770,000,000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	2 Dokumen	350,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	225,000,000		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

NO	RANCANGAN AWAL RKPA					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOIR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23 Laporan	3,300,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA, PPR	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit server & 5 unit samkel	5,200,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	23 Laporan	14,812,733,567	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 laporan	1,571,780,600	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	866000 Dokumen SKPD	230,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	23 Laporan	500,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	64 Dokumen	525,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
10	Penagihan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	82 WP PAP	500,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen	250,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	46 kegiatan	3,920,620,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PPR, HIBAH	
		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	46 kegiatan	23,000,000		Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	500,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	500,000,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru				PAA	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2023 merupakan rencana kerja tahunan dan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023. Rencana Kerja BPKA disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan salah satu Organisasi Perangkat Aceh yang bertugas dalam bidang pengelolaan keuangan. Program dan kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan usulan dari masyarakat, tetapi program dan kegiatan pada BPKA lebih bersifat pembinaan dan penyatuan visi bagi OPA lain serta kab/kota dalam pengelolaan keuangannya, sehingga program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tidak berasal dari usulan langsung masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT ACEH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

VISI

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut :



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikenal dengan NAWA CITA, yaitu:

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Penyusunan Ranwal Renja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh beriringan dengan prioritas yang tertuang dalam 9 prioritas pembangunan nasional yaitu pada point 2 (dua) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur Pemerintah di Pusat dan di Daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPA Tahun 2022, secara makro ekonomi Aceh dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembangunan Aceh pada tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu belum optimalnya pengelolaan asset dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan isu strategis Dana Otonomi Khusus

(OTSUS) masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Aceh dibandingkan dengan jenis penerimaan Aceh lainnya. Sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih tergolong kecil. Dengan kata lain, Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otsus dalam membiayai pembangunan Aceh. Dalam hal ini perlunya optimalisasi berbagai potensi sumber penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAA (dana cadangan BLUD, BUMA, imbal jasa perdagangan karbon, Investasi, ZISWAF). Kemandirian BLUD RSUZA diharapkan dapat dicapai pada tahun 2023 sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan PAA. Berbagai BUMA seperti: Bank Aceh dan PDPA perlu dievaluasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAA, serta mendorong pembentukan BUMA sektor produktif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPA

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2023 adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat;
- b. Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan serta peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
- c. Pembentukan struktur organisasi BPKA yang lebih sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan;
- d. Melengkapi semua dasar-dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SOP dan Sisdur serta aturan lainnya yang diperlukan;
- e. Meningkatnya potensi Pendapatan Aceh baik dari sektor Pajak, Retribusi dan Pendapatan Aceh Lainnya;
- f. Meningkatnya kualitas laporan kinerja tahunan;
- g. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Aceh;
- h. Terwujudnya pengamanan aset secara administrasi dan fisik;
- i. Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat;
- j. Lahirnya aparatur sipil negara yang handal dalam pengelolaan keuangan;
- k. Terwujudnya kemandirian daerah;
- l. Terwujudnya Kualitas Layanan Publik.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Aceh Tahun 2023 dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mengusulkan program dan kegiatan tahun 2023 pada table 3.3.



TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11
	Urusan Wajib								
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2,350,167,982,103				2,167,576,531,206
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	95%	159,134,319,620	PAA	-	95%	149,019,636,875
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	2,868,459,463	PAA	-	100%	3,155,305,407
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	10 Dokumen	1,261,586,000	PAA	-	10 Dokumen	1,387,744,600
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Dokumen	1,606,873,463	PAA	-	3 Dokumen	1,767,560,807
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	96,123,264,058	PAA	-	100%	96,498,264,058
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	371 Orang/Bulan	94,294,992,689	PAA, DAU	-	371 Orang/Bulan	94,419,992,689
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Laporan	921,392,825	PAA	-	5 Laporan	1,046,392,825
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Laporan	906,878,544	PAA	-	5 Laporan	1,031,878,544
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2,079,982,000	PAA	-	1 Laporan	1,874,688,000
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2,079,982,000	PAA	-	1 Laporan	1,874,688,000
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	100%	1,900,500,000	PAA	-	100%	1,421,988,000
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Paket	576,000,000	PAA	-	1 Paket	620,000,000
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	86 Orang	1,324,500,000	PAA	-	86 Orang	801,988,000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	12 Bulan	18,685,023,308	PAA	-	12 Bulan	16,564,558,759
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Paket	1,624,472,760	PAA	-	1 Paket	1,652,054,000
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Paket	7,478,478,300	PAA	-	2 Paket	6,036,886,450
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Paket	203,000,891	PAA	-	4 Paket	199,200,345

5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	12 Paket	4,426,675,329	PAA	-	12 Paket	4,870,811,440
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	10 Paket	957,646,028	PAA	-	10 Paket	813,096,524
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen	40,000,000	PAA	-	1 Dokumen	72,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2,803,250,000	PAA	-	1 Laporan	2,820,110,000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen	1,151,500,000	PAA	-	1 Dokumen	100,400,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	13 Unit	10,147,225,000	PAA	-	11 Unit	1,555,350,000
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Unit	3,145,065,000	PAA	-	2 Unit	755,000,000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	10 Unit	7,002,160,000	PAA	-	9 Unit	800,350,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Laporan	23,451,806,719	PAA	-	4 Laporan	23,888,897,451
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	320,970,000	PAA	-	1 Laporan	440,660,000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	7,175,361,140	PAA	-	1 Laporan	6,825,445,020
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2,564,422,680	PAA	-	1 Laporan	2,622,004,220
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	13,391,052,899	PAA	-	1 Laporan	14,000,788,211
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	257 Unit	3,878,059,072	PAA	-	257 Unit	4,060,585,200
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	250 Unit	2,906,900,000	PAA	-	250 Unit	2,995,032,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	7 Unit	971,159,072	PAA	-	8 Unit	1,065,553,200
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBA Tepat Waktu		Sesuai	2,143,780,814,617	PAA	-	Sesuai	1,973,440,624,922
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	209 Dokumen	11,310,927,580	PAA	-	209 Dokumen	11,862,049,420
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	1,669,583,000	PAA	-	2 Dokumen	1,769,583,000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	578,949,500	PAA	-	2 Dokumen	578,949,500
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	47 Dokumen	475,000,000	PAA	-	47 Dokumen	492,000,000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		47 Dokumen	650,000,000	PAA	-	47 Dokumen	679,000,000

5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	47 Dokumen	775,000,000	PAA	-	47 Dokumen	805,000,000
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	47 Dokumen	250,000,000	PAA	-	47 Dokumen	255,000,000
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	2,182,664,700	PAA	-	2 Dokumen	2,300,000,000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Dokumen	224,243,460	PAA	-	3 Dokumen	350,000,000
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	6 Dokumen	2,000,000,000	PAA	-	6 Dokumen	2,000,000,000
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	150,000,000	PAA	-	2 Dokumen	157,000,000
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	224,243,460	PAA	-	2 Dokumen	254,273,460
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	331,243,460	PAA	-	2 Dokumen	371,243,460
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	141 orang	1,800,000,000	PAA	-	141 orang	1,850,000,000
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya WTP Pemerintah kab/kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	926 Dokumen	6,129,721,800	PAA	-	926 Dokumen	6,742,691,000
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	1,086,806,000	PAA	-	23 Laporan	1,195,486,000
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	836,212,500	PAA	-	23 Laporan	919,833,000
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	844,942,500	PAA	-	23 Laporan	929,436,000
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	600 Dokumen	1,373,029,800	PAA	-	600 Dokumen	1,510,332,000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Laporan	1,138,731,000	PAA	-	5 Laporan	1,252,604,000
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	50 Orang	850,000,000	PAA	-	50 Orang	935,000,000
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	21 Dokumen	9,134,332,450	PAA	-	21 Dokumen	10,152,521,632
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	6 Dokumen	2,822,559,300	PAA	-	6 Dokumen	3,227,071,167

5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen (SPD)	75,000,000.00	PAA	-	1 Dokumen (SPD)	75,000,000.00
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Dokumen	1,751,893,700	PAA	-	5 Dokumen	1,927,083,070
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	500,000,000.00	PAA	-	1 Dokumen (MoU dengan Bank Daerah)	600,000,000.00
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	100,000,000.00	PAA	-	7 Laporan (LRA, DTH, RTH, Laporan Arus Kas, Laporan NTPN, LKT, LRT)	150,000,000.00
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	(BKU, BAR Bendahara Penerimaan, BAR Bendahara Pengeluaran, BAR NTPN,)	1,905,481,450	PAA	-	5 Dokumen	2,096,029,595
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Dokumen	1,979,398,000	PAA	-	5 Dokumen	2,077,337,800
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Laporan	11,878,211,564	PAA	-	4 Laporan	11,232,567,058
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Laporan	1,000,000,000	PAA	-	2 Laporan	1,100,000,000
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Dokumen	1,000,000,000	PAA	-	4 Dokumen	1,100,000,000
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	1,800,000,000	PAA	-	1 Laporan	1,980,000,000
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	2,500,000,000	PAA	-	1 Laporan	2,750,000,000
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 dokumen	500,000,000	PAA	-	4 dokumen	550,000,000
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen	2,500,000,000	PAA	-	-	-

5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	600 Orang	1,578,211,564	PAA	-	600 Orang	1,752,567,058
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	8 lembaga	1,000,000,000	PAA	-	8 Lembaga	2,000,000,000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Laporan	2,105,327,621,223	OA	-	3 Laporan	1,933,450,795,812
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	879,327,503,289	OA	-	1 Laporan	683,885,860,536
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	471,296,346,839	OA	-	1 Laporan	494,861,164,181
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	754,703,771,095	OA	-	1 Laporan	754,703,771,095
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	37.50%	14,074,713,699	PPR	-	62.50%	10,942,791,217
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	14,074,713,699	PPR	-	8 DOKUMEN 4 LAPORAN	10,942,791,217
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Dokumen	1,133,659,339	PPR	-	1 Dokumen	1,133,659,339
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	1,338,030,141	PPR	-	2 Dokumen	1,450,298,254
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	3 Laporan	4,867,126,173	PPR	-	2 Laporan	1,622,935,578
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	3,546,231,002	PPR	-	1 Laporan	3,546,231,002
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	1,165,512,135	PPR	-	1 Laporan	1,165,512,135
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	5 Dokumen	2,024,154,909	PPR	-	5 Dokumen	2,024,154,909
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	20%	33,178,134,167	PAA, PPR, HIBAH	-	21%	34,173,478,192
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	29%	33,178,134,167	PAA, PPR, HIBAH	-	30%	34,173,478,192
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	770,000,000	PAA	-	2 Dokumen	793,100,000
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Dokumen	350,000,000	PAA	-	2 Dokumen	360,500,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Laporan	225,000,000	PAA	-	2 Laporan	231,750,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	3,300,000,000	PAA, PPR	-	23 Laporan	3,399,000,000
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Unit server & 5 unit samkel	5,200,000,000	PAA	-	2 Unit server & 5 samkel	5,356,000,000

5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	14,812,733,567	PPR	-	23 Laporan	15,257,115,574
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 laporan	1,571,780,600	PAA	-	2 laporan	1,618,934,018
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	866000 Dokumen SKPD	230,000,000	PAA	-	876000 Dokumen SKPD	236,900,000
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	23 Laporan	500,000,000	PAA	-	23 Laporan	515,000,000
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	64 Dokumen	525,000,000	PAA	-	64 Dokumen	540,750,000
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	82 WP PAP	500,000,000	PAA	-	100000 WP	515,000,000
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	4 Dokumen	250,000,000	PAA	-	4 Dokumen	257,500,000
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	46 kegiatan	3,920,620,000	PPR, HIBAH	-	69 kegiatan	4,038,238,600
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	46 kegiatan	23,000,000	PAA	-	46 kegiatan	23,690,000
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	2 Laporan	500,000,000	PAA	-	2 Laporan	515,000,000
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Bandar Baru	1 Laporan	500,000,000	PAA	-	1 Laporan	515,000,000

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023 terdapat 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023 :

Dengan ditetapkannya tujuan, strategis dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah rencana program kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Alokasi Umum dan sumber-sumber lainnya yang merupakan bagian dari Pendapatan Aceh. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilihat pada tabel 4.1.



**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PROVINSI ACEH**

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	
1				Urusan Wajib			
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		2,350,167,982,103	
5	02			KEUANGAN			
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	159,134,319,620	
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	2,868,459,463	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,261,586,000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,606,873,463
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Administrasi Keuangan	96,123,264,058
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94,294,992,689
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	921,392,825
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	906,878,544
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA	2,079,982,000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,079,982,000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	1,900,500,000
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	576,000,000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,324,500,000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	18,685,023,308
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,624,472,760
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7,478,478,300
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	203,000,891

5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,426,675,329
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	957,646,028
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,803,250,000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,151,500,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA	10,147,225,000
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3,145,065,000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7,002,160,000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA	23,451,806,719
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	320,970,000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7,175,361,140
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,564,422,680
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,391,052,899
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	3,878,059,072
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,906,900,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	971,159,072
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBA Tepat Waktu	2,143,780,814,617
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	11,310,927,580
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1,669,583,000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	578,949,500
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	475,000,000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	650,000,000

5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	775,000,000
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	250,000,000
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2,182,664,700
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	224,243,460
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2,000,000,000
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	150,000,000
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	224,243,460
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	331,243,460
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	1,800,000,000
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya WTP Pemerintah kab/kota	6,129,721,800
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1,086,806,000
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	836,212,500
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	844,942,500
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	1,373,029,800
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1,138,731,000

5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	850,000,000
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	9,134,332,450
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2,822,559,300
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	75,000,000.00
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1,751,893,700
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	500,000,000.00
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100,000,000.00
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1,905,481,450
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1,979,398,000
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	11,878,211,564
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1,000,000,000

5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1,000,000,000
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1,800,000,000
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2,500,000,000
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	500,000,000
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2,500,000,000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1,578,211,564
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1,000,000,000
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	tercapainya WTP Pemerintah Daerah	2,105,327,621,223
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	879,327,503,289
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	471,296,346,839
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	754,703,771,095
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	14,074,713,699
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Pemerintah Aceh	14,074,713,699
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1,133,659,339
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1,338,030,141
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4,867,126,173
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3,546,231,002
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1,165,512,135

5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2,024,154,909
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kemandirian Fiskal Aceh	33,178,134,167
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Aceh terhadap Total Pendapatan Aceh	33,178,134,167
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	770,000,000
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	350,000,000
						Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	225,000,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3,300,000,000
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5,200,000,000
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14,812,733,567
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,571,780,600
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	230,000,000
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	500,000,000
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	525,000,000
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	500,000,000
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	250,000,000
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	3,920,620,000
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	23,000,000
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	500,000,000
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	500,000,000

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2023 ini mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Renja BPKA merupakan dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun melalui proses yang panjang dengan tujuan tercapainya target-target yang telah ditentukan, diharapkan penyusunan dokumen KUA-PPAS, RKA dan DPA mengacu dan berpedoman pada Renja ini, juga diharapkan segala kendala dan tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan BPKA dalam Renja Tahun 2023 bertujuan sebagai panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi BPKA dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, dan juga memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan Tahun Anggaran 2023. Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk dapat mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Rancangan Awal Rencana kerja 2023

Demi merealisasikan semua target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada BPKA, maka dalam ranwal renja tahun anggaran 2023 BPKA merencanakan 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengalokasian sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai, serta BPKA akan terus meningkatkan kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya Ranwal Renja BPKA, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi gubernur diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) BPKA Tahun 2023, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2023 yang akan datang.

Kami menyadari penyusunan dan penyajian Rancangan Awal Renja BPKA Tahun 2023 ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun sangat diharapkan Renja Tahun 2023 ini dapat memberi manfaat bagi para pengambil kebijakan (*Stake-Holders*) demi terwujudnya pembangunan Aceh secara menyeluruh dan terintegrasi.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang akan datang.

Banda Aceh, April 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

AZHARI, SE, M.Si
NIP. 1963032519891003